

ABSTRAK

Pembebanan Hak Tanggungan atas obyek jaminan hak atas tanah mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Para pihak yang dimaksud adalah kreditor bank dan debitor. Dengan adanya Hak Tanggungan, maka kepentingan para pihak akan dapat terlindungi dengan baik. Khususnya bagi kreditor bank, maka kreditor bank diberikan hak oleh undang-undang untuk melelang obyek jaminan Hak Tanggungan apabila debitor wanprestasi. Namun, ternyata hal tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditor bank, apabila *wanprestasi* yang dilakukan oleh debitor dikarenakan yang bersangkutan menjadi terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dan obyek jaminan Hak Tanggungannya tersebut dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka di dalam penelitian ini diangkatlah pokok permasalahan, yaitu apakah kedudukan dan akibat hukum, serta apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor bank pemegang Hak Tanggungan atas obyek jaminan debitor yang dirampas oleh negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui proses identifikasi dan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dilakukan penyeleksian untuk mendapatkan kumpulan bahan-bahan hukum yang relevan untuk penulisan tesis ini, yaitu sesuai dengan rumusan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa perampasan obyek jaminan Hak Tanggungan oleh negara tidak dapat mendegradasi kedudukan dan akibat hukum kreditor bank sebagai pemegang Hak Tanggungan yang diutamakan (kreditor preferen). Sedangkan, upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor bank pemegang Hak Tanggungan atas obyek jaminan debitor yang dirampas oleh negara dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dan/ atau dengan mengajukan gugatan perdata kepada debitor yang menjadi terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Kata kunci: Hak Tanggungan, Kreditor Bank, Debitor, Korupsi

ABSTRACT

Imposition of the Amenability Rights to the guarantee object of land rights aims to ensure legal certainty of the parties; the creditor and the debtor. The interests of the parties will be well protected by the Amenability Rights. The bank creditor, particularly, will be given by statute the rights to auction the guarantee object of the Amenability Rights if the debtor defaults. However, the auction can not necessarily done by the bank creditor if the default is caused by the conviction of the debtor in corruption cases which leads to seizure of the guarantee object of the Amenability Rights based on a legally binding verdict (inkracht van gewijsde). Based on the things mentioned above, this thesis is discussing about the legal status and consequences of the bank creditor and what attempts they can do with the Amenability Rights of the debtor's guarantee object seized by the state in corruption cases. This is a juridical-normative research which is done by applying statute approach and conceptual approach. The law materials in this study are collected through the identification and inventory process of primary and secondary law materials. Those materials are then selected in order to get the ones that are relevant to the research question of this thesis. The findings of this research suggest that the verdict that imposes additional sanctions in the form of seizing the guarantee object of the Amenability Rights by the state cannot degrade the legal status and consequences of the bank creditor as the preferred holder of the Amenability Rights (preferred creditor). While for the attempts by the bank creditor as the holder of the Amenability Rights of the guarantee object seized by the state in corruption cases, there are two possible attempts; submitting the letter of objection to the respective court and/or submitting civil action to the debtor convicted in corruption cases.

Keywords: *Amenability Rights, Banks Creditor, Debtor, Corruption*